

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Untuk Periode yang Berakhir

30 Juni Tahun 2019

Bagian Anggaran 005.01.307178

(Badan Urusan Administrasi MA-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Samarinda

Samarinda - Kalimantan Timur 75124

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Pengadilan Agama Samarinda. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Samarinda, 3 Juli 2019
Ketua Pengguna Anggaran,

SURIYANATA, S.H.
NIP. 19770814 199703 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
DaftarTabeldanlampiran	iii
Ringkasan	iv
PERNYATAANTANGGUNG JAWAB	v
I. LaporanRealisasiAnggaran	3
II. Neraca	4
III. CatatanatasLaporanKeuangan	7
A. PenjelasanUmum	7
B. PenjelasanatasPos-posLaporanRealisasiAnggaran	18
C. PenjelasanatasPos-posNeraca	23
D. PenjelasanatasPos-posLaporanOperasional	32
E. PenjelasanatasPos-posLaporanPerubahanEkuitas	36
F. PengungkapanPentingLainnya	38
VI. LampirandanDaftar	



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 64 Samarinda Telp. (0541) 742018 / Faksimili 7773747

Email : pa-samarinda@pta-samarinda.net

SAMARINDA - 75124

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 3 Juli 2019

Ketua Pengguna Anggaran,



SURYANATA, S.H.

NIP. 19770814 199703 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda 30 Juni 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 31 Desember 2018 sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari Pendapatan-LRA.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp3.499.612.906,00 atau mencapai 41.20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.493.256.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.327.256.234,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp44.488.572,00. Aset Tetap (neto) sebesar Rp22.280.292.662,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp18.530.490,00 dan Rp22.308.725.744,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.624.234.669,00. Sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.624.234.669,00). Tidak terdapat Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2019.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp22.308.725.744,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(3.624.231.444,00) dikurangi Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp0,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.499.612.906,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp22.308.725.744,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 & 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	No.	30 Juni 2019		% thd Angg	31 Des 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	A				
Penerimaan Negara ;	A I.1				
Penerimaan Perpajakan	A I.1.a	-	-		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A I.1.b	-	-		10,738,000
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		-	-	-	10,738,000
BELANJA NEGARA	B				
Belanja Murni ;	B I.1				
Belanja Pegawai	B I.1.a	7,371,893,000	3,038,523,018	41.22	3,188,251,783
Belanja Barang	B I.1.b	1,057,863,000	461,089,888	43.59	503,500,335
Belanja Modal	B I.1.c	63,500,000	-	-	167,000,000
Pembayaran Bunga Utang	B I.1.d	-	-		
Subsidi	B I.1.e	-	-		
Hibah	B I.1.f	-	-		
Bantuan Sosial	B I.1.g	-	-		
Belanja Lain-lain	B I.1.h	-	-		
Pinjaman dan Hibah ;		-	-		
Belanja Pegawai	B I.2.a	-	-		
Belanja Barang	B I.2.b	-	-		
Belanja Modal	B I.2.c	-	-		
Pembayaran Bunga Utang	B I.2.d	-	-		
Subsidi	B I.2.e	-	-		
Hibah	B I.2.f	-	-		
Bantuan Sosial	B I.2.g	-	-		
Belanja Lain-lain	B I.2.h	-	-		
JUMLAH BELANJA		8,493,256,000	3,499,612,906	41.20	3,858,752,118
PEMBIAYAAN	C				
Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	C I				
Perbankan Dalam Negeri	C I.1	-	-	-	-
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	C I.2	-	-	-	-
Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	C II	-	-	-	-
Penarikan Pinjaman Luar Negeri	C II.1	-	-	-	-
Pembayaran Dalam Pokok Utang Luar Negeri	C II.1	-	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN		-	-	-	-

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
NERACA
Per 30 Juni 2019 DAN 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2019	31 Desember 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	40.000.000,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	0,00	0,00
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih harus diterima	C.9	0,00	0,00
Persediaan	C.10	4.488.572,00	4.678.247,00
Jumlah Aset Lancar		44.488.572,00	4.678.247,00
ASET TETAP			
Tanah	C.14	16.945.584.000,00	16.945.584.000,00
Peralatan dan Mesin	C.15	2.539.377.975,00	2.828.418.275,00
Gedung dan Bangunan	C.16	4.963.146.000,00	4.963.146.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.215.178,00	3.215.178,00
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2.460.070.791,00)	(2.293.321.658,00)
Jumlah Aset Tetap		22.280.292.662,00	22.447.041.795,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	4.950.000,00	4.950.000,00
Aset Lain-Lain	C.22	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(2.475.000,00)	(1.856.250,00)
Jumlah Aset Lainnya		2.475.000,00	3.093.750,00
JUMLAH ASET		22.327.256.234,00	22.454.813.792,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	0,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	(21.469.510,00)	21.469.510,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.26	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	0,00	0,00
Beban yang masih harus Dibayarkan	C.28	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.530.490,00	21.469.510,00
JUMLAH KEWAJIBAN		18.530.490,00	21.469.510,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	22,308.725.744,00	22.433.344.282,00
JUMLAH EKUITAS		22.308.725.744,00	22.433.344.282,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.327.256.234,00	22.454.813.792,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.028.701.992,00	6.509.906.250,00
Beban Persediaan	D.3	14.799.975,00	27.527.713,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	256.674.325,00	572.406.139,00
Beban Pemeliharaan	D.5	127.203.494,00	264.211.403,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	29.487.000,00	68.921.257,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	167.367.883,00	33.697.021,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0,00	0,00
Beban Lain-lain	D.9	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		3.624.234.669,00	7.782.669.983,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.624.234.669,00)	(7.782.669.983,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0,00	14.801.880,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	36.328.837,00
Defisit Selisih Kurs		0,00	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.225,00	(21.540.576,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		0,00	0,00
POS LUAR BIASA	D.11		
Pendapatan PNB		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.624.231.444,00)	(7.804.210.359,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2019	30 Juni 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	22.433.344.282,00	22.359.860.886,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.	(3.624.231.444,00)	(3.833.762.342,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESLAHAN MENDASAR		0,00	(240.000,00)
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Kewajiban		0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.5.	990,00	990,00
Koreksi Lain-lain		0,00	(240.000,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		3.499.612.906,00	3.848.166.718,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(124.618.538,00)	14.163.376,00
EKUITAS AKHIR		22.308.725.744,00	22.374.024.262,00

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan teknis Pengadilan Agama Samarinda

Dasar Hukum

Entitas

dan Rencana

Strategis

Pengadilan Agama Samarinda sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota Samarinda di Propinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama sesuai wilayah hukumnya.

Pengadilan Agama Samarinda didirikan sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama sesuai wilayah hukumnya, hal ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehubungan permasalahan terkait perceraian, penetapan waris, dispensasi nikah dan sebagainya.

Sebagai suatu entitas akuntansi, Pengadilan Agama Samarinda mengelola dana APBN dalam bentuk DIPA yang setiap tahun telah dialokasikan sesuai kebutuhan yang sebelumnya tertuang dalam dokumen perencanaan, kemudian mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan anggaran tersebut melalui Pelaporan Keuangan yang disajikan dengan akuntabel, akurat serta transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Samarinda berkomitmen dengan visi ***“terwujudnya pelayanan Pengadilan Agama Samarinda yang prima, bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum”***.

Adapun misi Pengadilan Agama Samarinda adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan.
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.
4. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan.

5. Meningkatkan sarana dan prasana hukum.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan tertib administrasi perkara.
3. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
7. Peningkatan manajemen peradilan agama.
8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
9. Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung RI.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat

kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar**Pengukuran****A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan**Akuntansi****A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 30 Juni 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**A. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi criteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan /atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini mewujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara /DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasikan ke Aset Lain-lain pada Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari necara pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

<i>Kelompok Aset Tetap</i>	<i>Masa Manfaat</i>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang***c. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya***d. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan aset yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat dalam neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2018 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasikan menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Samarinda mengadakan revisi POK dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut dirincikan sebagai berikut:

Uraian	2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00
Belanja		
Belanja Barang Non Operasional	50.990.000,00	50.990.000,00
Belanja Pegawai	7.371.893.000,00	7.371.893.000,00
Belanja Barang Operasional	935.823.000,00	1.006.873.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Modal	37.500.000,00	63.500.000,00
Jumlah Belanja	8.396.206.000,00	8.493.254.000,00

Realisasi
Pendapatan Rp0,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari estimasi pendapatan yaitu sebesar Rp0,00.

Tidak terdapat Pendapatan Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2019		
	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Angg
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan berupa

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada 30 Juni 2019 mengalami Penurunan sebesar 100 persen dibandingkan per 30 Desember 2018. Hal ini disebabkan tidak adanya Pendapatan dan Pemindatanganan BMN Lainnya pada Pengadilan Agama Samarinda.

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lain-lain berupa Pendapatan dan Pemindatanganan BMN Lainnya pada 30 Juni 2019 sehingga mengalami Penurunan sebesar 100 persen dibandingkan per 30 Desember 2018.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 30 Juni 2019 dan 30 Desember 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Desember 2018	Naik/Turun (%)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	10.738.000,00	100

Realisasi
Belanja Negara
Rp3.499.612.906,00

B.2. Belanja

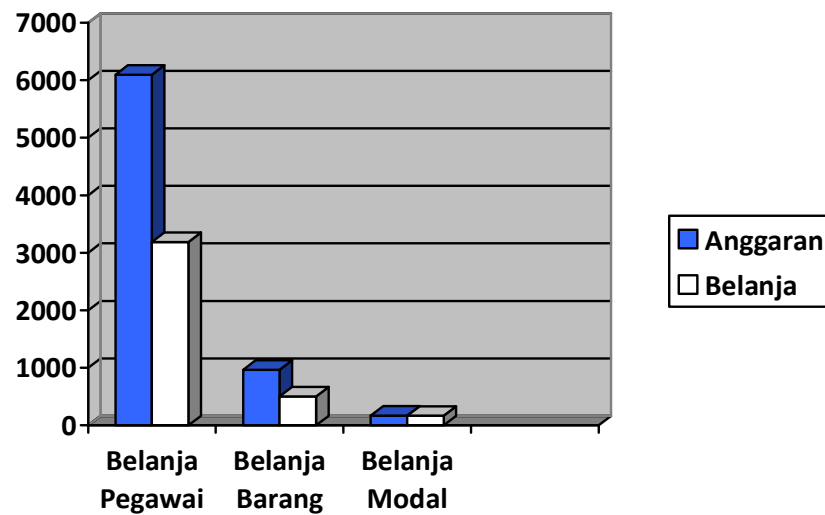
Realisasi Belanja Pengadilan Agama Samarinda sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp3.499.612.906,00.atau 41.20 persen dari anggaran belanja sebesar Rp8.493.256.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2019

Uraian	Anggaran	30 Juni 2019	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.371.893.000,00	3.038.523.018,00	41.22
Belanja Barang	1.057.863.000,00	461.089.888,00	43.59
Belanja Modal	63.500.000,00	0,00	0.00
JUMLAH	8.493.256.000,00	3.499.612.902,00	41.20

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Dibandingkan dengan 30 Juni 2018, Realisasi Belanja periode 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 53.35 persen atau sebesar Rp3.858.903.718,00. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan alokasi pagu Belanja Pegawai serta bertambahnya jumlah pegawai mempengaruhi naiknya realisasi Belanja Pegawai.
2. Realisasi penyerapan Belanja Barang turun walaupun masih menyisakan 1 (satu) Semester bulan dan tidak dipengaruhi oleh turunnya pagu Belanja Barang.
3. Terdapat Realisasi Belanja pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Samarinda yang sangat mempengaruhi Realisasi Anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja

30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	Per 30 Juni 2019	Per 30 Juni 2018	Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	3.038.523.018,00	3.188.251.783,00	11.08
Belanja Barang	461.089.888,00	503.500.335,00	8.48
Belanja Modal	0,00	167.151.600,00	98.32
Jumlah seluruhnya	3.499.612.906,00	3.858.903.718,00	12.15

Belanja Pegawai
Rp3.038.523.018,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.038.532.018,00 dan Rp3.188.251.783,00. Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 11.22 persen dari 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu untuk Belanja Pegawai mengalami kenaikan disebabkan adanya

penambahan jabatan struktural dan fungsional.

2. Terdapat Penambahan Anggaran pada Belanja Tunjangan PPh PNS Pegawai Tahun Anggaran 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Pegawai

30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik/ Turun (%)
Belanja Gaji & Tunj. PNS	2.911.777.018,00	2.980.531.321,00	8.03
Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0.00
Belanja Uang Makan PNS	126.746.000,00	137.721.000,00	3.05
Jumlah Belanja Bruto	3.038.523.018,00	3.188.306.000,00	11.08
Pengembalian Bel. Pegawai	(1.632)	(538)	0,00
Jumlah Belanja Netto	3.038.521.386,00	3.188.305.462,00	11.08

Belanja Barang
Rp461.089.888,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp461.089.888,00 dan Rp503.500.335,00. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar 8.48 persen dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2018.

Hal ini antara lain disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran pagu belanja barang operasional, non operasional dan belanja pemeliharaan sehingga realisasi penyerapan anggaran belanja barang meningkat.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik/ Turun (%)
Belanja Barang Operasional	203.216.191,00	207.451.700,00	(1.86)
Belanja Persediaan	15.143.325,00	7.358.325,00	4,42
Belanja Barang Non Operasional	26.625.000,00	2.802.000,00	23.01
Belanja Jasa	79.686.128,00	70.478.953,00	1.36
Belanja Pemeliharaan	126.667.244,00	182.936.020,00	(7.54)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.307.000,00	32.473.337,00	(6.83)
Jumlah Belanja Bruto	434.464.888,00	503.500.335,00	8.48
Pengembalian Belanja	(1.632,00)	(538,00)	0,00
Jumlah Belanja Netto	434.463.256,00	503.499.797,00	8.48

Belanja Modal**Rp0,00****B.5 Belanja Modal**

Tida Terdapat Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2019 atau 0,00 persen dari pagu Belanja Modal 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi belanja modal pada 30 Juni 2018 sebesar Rp167.151.600,00.

B.5.1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat Alokasi pagu Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp0,00 berupa Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan. Realisasi sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp0,00.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp63.500.000,00. Adapun realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00 persen dari pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sedangkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp167.151.600,00.

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Alokasi pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dan juga pada Tahun Anggaran 2019.

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00. Adapun realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp0,00, dan juga Tidak terdapat Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2018.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp40.000.000,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp0,00 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Bank BRI No. Acc. 008201000074308	0,00	0,00
Uang Tunai di Brankas	40.000.000,00	0,00
Kwitansi yang belum di SP2D kan	0,00	0,00
Jumlah	40.000.000,00	0,00

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bendahara penerima tidak mempunyai rekening karena seluruh pendapatan langsung disetor ke kas negara.

*Beban Dibayar di Muka
Rp0,00*

C.3 Beban Dibayar di Muka

Tidak terdapat Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2019, sedangkan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.265.030,00. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Rincian Beban Dibayar di Muka
Per 30 Juni 2019 dan per 31 Desember 2018*

Jenis	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Persekot Gaji	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Persediaan**Rp4.488.572,00****C.4 Persediaan**

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp4.488.572,00 dan Rp4.678.247,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan*Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018*

Persediaan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	4.488.572,00	4.678.247,00
Jumlah	4.488.572,00	4.678.247,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan tanggal 30 Juni 2019.

Tanah**Rp16.945.584.000,00****C.5 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Samarinda per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 keduanya bernilai sama yakni Rp16.945.584.000,00. Tidak ada kenaikan nilai aset tetap Tanah di tahun 2019. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	16.945.584.000,00
Mutasi tambah	
Pembelian	-
Mutasi kurang	
Penyitaan Pengadilan	-
Saldo per 30 Juni 2019	16.945.584.000,00

Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang pada Aset Tanah Pengadilan Agama Samarinda. Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah per 30 Juni 2019

No	Luas	Lokasi	Peruntukan	Nilai
1	2.404 m2	Jl. Ir. H. Juanda No.64 Samarinda	Gedung Kantor	16.945.584.000
		Jumlah		16.945.584.000

Peralatan dan Mesin
Rp2.828.418.275,00

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan per 31 Desember 2018 bernilai sebesar Rp2.828.418.275,00 dan Rp2.828.418.275,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	2.828.418.275,00
Mutasi tambah :	
Pembelian	0,00
Transfer Masuk	0,00
Koreksi Tambah	-
Mutasi kurang :	
Penghentian dari Penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2019	2.828.418.275,00
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2016	(2.223.778.343,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	604.639.9932,00

Tidak terdapat Mutasi Tambah pada aset Peralatan dan Mesin.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp4.963.146.000,00

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 keduanya bernilai sebesar Rp4.963.146.000,00 dan Rp4.963.146.000,00 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	4.963.146.000,00
Mutasi tambah	
Transfer masuk	0,00
Mutasi kurang	
Transfer keluar	0,00
Saldo per 30 Juni 2019	4.963.146.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	(236.292.448,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	4.726.853.552,00

Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang pada Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Samarinda. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0,00

C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 keduanya bernilai sama yakni sebesar Rp0,00. Mutasi transaksi terhadap

Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0,00
Mutasi tambah	
Transfer masuk	0,00
Mutasi kurang	
Transfer keluar	0,00
Saldo per 30 Juni 2019	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	0,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	0,00

Tidak terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang pada aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp3.215.178,00

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 keduanya bernilai sama yakni sebesar Rp3.215.178,00.

Adapun Aset Tetap Lainnya tersebut berupa Buku Monografi senilai Rp386.500,00 dan Buku Lainnya senilai 2.828.678,00.

Terdapat mutasi kurang berupa Bahan Kartografi senilai Rp80.000,00 akibat penjualan/penghapusan BMN pada periode 31 Desember tahun 2018.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(2.260.070.791,00)

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp(2.460.070.791,00) dan Rp(2.293.321.658,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.828.418.275,00 0	2.223.778.343,00	604639932,00
2	Gedung dan Bangunan	4.963.146.000,00	236.292.448,00	4.726.853.552,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	3.215.178,00	0,00	3.215.178,00
Jumlah		7.794.779.453,00	2.460.070.791,00	5.334708.662,00

Uang Muka dari KPPN
Rp40.000.000,00

C.11 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp22.308.725.744,00

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.308.725.744,00 dan Rp22.433.344.282,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp0,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2019 dan per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni 2019 dan per 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pembayaran Persekot Gaji Pegawai Pengadilan Agama Samarinda sampai dengan 30 Jun 2019.

Beban Pegawai
Rp3.028.701.992,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2019 dan per 30 Juni 2018 dan adalah masing-masing sebesar Rp3.028.701.992,00 dan Rp3.181.852.239,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.032.280.440,00	1.035.734.800,00	0.14
Beban Pembulatan Gaji PNS	12.842,00	9.888,00	29.87
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	70.885.920,00	71.921.570,00	(1.44)
Beban Tunjangan Anak PNS	18.888.160,00	19.346.636,00	(2.36)
Beban Tunjangan Struktural PNS	20.650.000,00	20.160.000,00	2.43
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.402.340.000,00	1.521.720.000,00	(7.84)
Beban Tunjangan PPh PNS	221.719.890,00	237.105.225,00	(6.48)
Beban Tunjangan Beras PNS	39.613.740,00	42.438.120,00	(6.65)
Beban Uang Makan PNS	126.746.000,00	137.721.000,00	(7.96)
Beban Tunjangan Umum PNS	5.515.000,00	6.595.000,00	(16.37)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	85.050.000,00	89.100.000,00	(4.54)
Jumlah	3.028.701.992,00	3.181.852.238,00	(4.81)

Beban Persediaan
Rp14.799.975,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2019 dan per 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp14.799.975,00 dan Rp8.096.263,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan
Per 30 Juni 2019 dan per 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	14.799.975,00	8.096.263,00	14.05
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.799.975,00	8.096.263,00	14.05

**Beban Barang dan
Jasa**
Rp256.674.325,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp256.674.325,00 dan Rp267.807.289,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	168.296.391,00	162.902.200,00	3.46
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	390.500,00	46.500,00	739.78
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.700.000,00	17.200.000,00	14.53
Beban Barang Operasional Lainnya	9.962.300,00	26.200.000,00	(61.97)
Beban Bahan	1.445.000,00	2.802.000,00	(48.42)
Beban Non Operasional Lainnya	5.445.000,00	0,00	0.00
Beban Langganan Listrik	46.140.068,00	51.765.218,00	(10.86)
Beban Langganan Telepon	1.023.732,00	1.571.822,00	(34.86)
Beban Langganan Air	4.271.334,00	5,309.549,00	(19.55)
Beban Jasa Lainnya	0,00	250.000,00	100.00
Jumlah	256.674.325,00	268.047.289,00	(4.15)

Beban
Pemeliharaan
Rp127.203.494,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp127.203.494,00 dan Rp182.936.020,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	82.409.000,00	135.801.400,00	(39.31)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.258.244,00	42.134.620,00	(6.10)
Beban Pemeliharaan Jaringan	536.250,00	0,00	0,00
Jumlah	127.203.494,00	182.936.020,00	(30.47)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp29.487.000,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29.487.000,00 dan Rp32.473.337,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	8.307.000,00	16.323.337,00	(49.10)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.180.000,00	16.150.000,00	31.14
Jumlah	29.487.000,00	32.473.337,00	(9.19)

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp67.367.883,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp167.367.883,00 dan Rp171.335.194,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Software. Rincian

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	107.676.021,00	109.378.846,00	(1.55)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	59.073.112,00	59.073.112,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	0,00	0,00	0.00
Beban Penyusutan Software	618.750,00	618.750,00	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak dipergunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	2.266.486,00	0.00
Jumlah	167.367.883,00	171.335.194,00	(2.31)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**Ekuitas Awal**Rp22.433.344.282,
00**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.433.344.282,00 dan Rp22.359.860.996,00.

Defisit LORp(3.624.231.444,0
0)**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp(3.624.231.444,00) dan Rp(3.834.002.342,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Ekuitas AkhirRp22.308.725.744,
00**E.7 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.308.725.744,00 dan Rp22.433.344.282,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak Terdapat Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada 30 Juni 2019.

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0082-01-000074-308 dengan Surat izin rekening dari Kementerian Keuangan Nomor S-0568/WPB.020/KP.046/2015 tanggal 25 Februari 2015.

F.4 Revisi DIPA

Terdapat Revisi DIPA per 30 Juni 2019 ;

- Revisi DIPA 1 tanggal 31 Mei 2019 dalam rangka :
 - Penambahan nilai pagu pada Belanja Langganan Data dan Jasa semula Rp200.366.000,00 menjadi Rp271.416.000,00;
 - Penambahan nilai pagu pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp37.500.000,00 menjadi Rp63.500.000,00;
- Revisi DIPA 2 tanggal 26 juni 2019 dalam rangka :
 - Penambahan nilai pagu pada Belanja Keperluan Perkantoran semula Rp294.300.000,00 menjadi Rp297.866.000,00;
 - Penambahan nilai pagu pada Belanja Barang Operasional Lainnya semula Rp15.586.000,00 menjadi Rp24.476.000,00;
 - Pengurangan nilai pagu pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp174.150.000,00 menjadi Rp118.100.000,00;
 - Penambahan nilai pagu pada Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp115.614.000,00 menjadi Rp137.614.000,00;

F.5 Revisi POK

Terdapat Revisi POK per 30 Juni 2017 yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

- Revisi POK 1 tanggal 01 Juni 2019 dalam rangka :
 - Penambahan nilai pagu pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Konsultasi) semula Rp3.840.000,00 menjadi Rp17.920.000,00;
 - Penambahan nilai pagu pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Koordinasi) semula Rp41.600.000,00 menjadi Rp27.520.000,00;
 - Pengurangan nilai pagu pada Belanja Keperluan Perkantoran semula Rp10.500.000,00 menjadi Rp14.066.000,00;
 - Penambahan nilai pagu pada Belanja Langganan Air semula Rp6.216.000,00 menjadi Rp30.600.000,00;
 - Pengurangan nilai pagu pada Belanja Pemeliharaan Gedung semula Rp174.150.000,00

menjadi Rp146.200.000,00;

F.6 Ralat SPM, SP2D, dan SSBP

Tidak terdapat Ralat SPM, SP2D dan SSBP per 30 Juni 2019;

F.7 Pengungkapan Lain Lain

Selama tahun 2019 per 30 Juni 2019 tidak terdapat perubahan pada Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Samarinda masih menunjuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Samarinda tentang perubahan Tim Pengelola DIPA Nomor W17-A1/2163/KU.01/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Suriyanata, SH.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Suriyanata, SH.
Pejabat Penandatanganan / Penguji SPM	: Abd. Azis, S. Ag., M.H.
Bendahara Pengeluaran	: M. Khairul Anwar

Bendahara Penerimaan/Pejabat	
Pembuat Anggaran Belanja	: Siska Angustina Listyaningsih
Anggota	: Rohimah, SH.

-